



RENCANA KERJA TAHUN 2025



DINAS LINGUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka disusunlah Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi Tahun 2025 yang merupakan ikhtisar Rencana Kerja yang akan dicapai selama Tahun 2025. Rencana Kerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar pedoman dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2025.

Diharapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 ini mampu dijadikan acuan untuk perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Kami menyadari Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 ini dapat dijadikan arah di dalam melaksanakan seluruh Program/Kegiatan serta mampu memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi guna mewujudkan “*good governance*” di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : Juni 2024

KEPALA DINAS,

Dr. H. VARIAT ADHI PUTRA, ST. MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 196601052000121002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2023	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2023 dan Capaian Prioritas RENSTRA DLH Prov. Jambi Tahun 2024	 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	66
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	70
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	72
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	91
III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN	92
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	92
3.2. Tujuan dan Sasaran	98
3.3. Program dan Kegiatan	103
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	129
V PENUTUP	140



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD DLH TA 2023	9
Tabel 2	Anggaran Pendapatan Dan Belanja DLH TA 2023	16
Tabel 3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA OPD dan Pencapaian RENSTRA DLH Provinsi Jambi s/d Tahun 2023	50
Tabel 4	Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	67
Tabel 6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Jambi	72
Tabel 7	Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025	100
Tabel 8	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 beserta Proyeksi Maju Tahun 2026 Provinsi Jambi	105
Tabel 9	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (RENJA) SKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

RENJA PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). RENJA SKPD memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang kemudian menjadi bahan utama masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau disebut RKPD Provinsi Jambi serta pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi atau disebut DLH Provinsi Jambi yang berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Serta dijabarkan uraian tugasnya dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 28

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi memiliki tugas sebagai pelaksana dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup, perlu merumuskan dan menyusun Rencana Kerja SKPD guna mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang berbasis pada pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan hidup. Renja SKPD sebagaimana dimaksud merupakan hasil Musrenbang Provinsi Jambi, serta hasil pembahasan usulan program dan kegiatan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang disinergikan dengan mengacu pada program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra DLH Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dan merupakan kebijakan, indikator kinerja, kelompok sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra DLH Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja DLH Provinsi Jambi, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 52);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah

1. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.
2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat tentang pengertian singkat Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 dan urgensi terhadap penyusunannya yang terdiri dari :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

B. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2023

Bab II memuat tentang narasi dan deskripsi hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH Provinsi Jambi Tahun 2023 dan capaian prioritas dan target program Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2023 serta isu strategis terkait kebijakan bidang lingkungan hidup dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Jambi.

C. BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Bab III memuat tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dan kebutuhan dana atau pembiayaan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025.

D. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab IV memuat program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

E. BAB V PENUTUP

Bab V memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN PRIORITAS RENSTRA DLH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran Tahun 2023

Dana APBD adalah sebesar Rp23.125.384.218,- (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah) dengan rincian :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp14.120.298.459,-
Belanja Pegawai	Rp14.120.298.459,-
b. Belanja Langsung	Rp9.005.085.759,-
Belanja Pegawai	Rp272.940.000,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp7.737.182.884,-
Belanja Modal	Rp994.962.875,-

Jumlah Anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan APBD Perubahan, dimana jumlah APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp22.536.208.155,- dan jumlah anggaran setelah proses refocusing, perubahan dan pergeseran, nilai APBD menjadi Rp23.125.384.218,-. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mengalami refocusing anggaran sebesar Rp1.081.104.100,-, kemudian mendapat kembali tambahan anggaran sebesar Rp1.670.280.163,- untuk :

- Subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan sebesar Rp753.661.703,-
- Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi sebesar Rp35.000.000,-
- Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp865.118.460,-
- Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan sebesar Rp16.500.000,-

Penambahan anggaran untuk 3 subkegiatan, selain subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan bertujuan untuk proses reakreditasi laboratorium lingkungan hidup yang akreditasinya dibekukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Alokasi anggaran bidang lingkungan hidup dari APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.125.384.218,- (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung (1 subkegiatan rutin) sebesar Rp14.120.298.459,- dan Belanja Langsung sebesar Rp9.005.085.759,- untuk mendanai 9 Program (1 program rutin dan 8 program urusan LH), 17 kegiatan (7 kegiatan rutin dan 10 kegiatan urusan LH), 39 subkegiatan (24 subkegiatan rutin dan 15 subkegiatan urusan LH).

Selain mengelola dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi, pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi juga menghasilkan dana pendapatan sebagai Penerimaan Asli Daerah yang bersumber dari jasa analisa sampel Laboratorium DLH Provinsi Jambi. Target penerimaan retribusi jasa laboratorium Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.876.490.200,- dan realisasi per 31 Desember sebesar Rp2.325.415.745,- (80,84%).

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2023 tidak memperoleh Dana Dekonsentrasi/APBN.

2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp22.569.449.279,- (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh Sembilan dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 97,60% dengan sisa dana sebesar Rp555.934.939,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Rincian realisasi sbb :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp13.965.453.534,-
Belanja Pegawai	Rp13.965.453.534,-
b. Belanja Langsung	Rp8.603.995.745,-
Belanja Pegawai	Rp238.020.000,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp7.566.520.545,-
Belanja Modal	Rp799.455.200,-

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember sebesar Rp2.325.415.745,- (80,84%). Realisasi tahun 2023 ini belum memenuhi target, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2022 yang penerimaannya sebesar Rp3.217.807.560,-.

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 1
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dana APBD Tahun Anggaran 2023

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp.)
					Rp.	% Keu	% Fisik	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	1. Nilai AKIP		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.021.655.248	16.652.245.715	97,83	98,67	369.409.533
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	229.260.000	221.396.133	96,57	100,00	7.863.867
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.675.000	84.588.322	94,33	100,00	5.086.678
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.660.000	7.660.000	100,00	100,00	0
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.625.000	7.150.500	93,78	100,00	474.500
		4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9.640.000	9.190.000	95,33	100,00	450.000
		5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6.730.000	6.730.000	100,00	100,00	0
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.440.000	44.116.651	97,09	100	1.323.349

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp.)
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.490.000	61.960.660	99,15	100,00	529.340
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.147.728.459	13.990.630.324	98,89	100,00	157.098.135
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.120.298.459	13.965.453.534	98,90	100,00	154.844.925
		2	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	27.430.000	25.176.790	91,79	100,00	2.253.210
		3	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0	0	0
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	0	0	0	0	0
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.477.200	43.477.200	87,87	95,24	6.000.000
		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.977.200	38.977.200	86,66	90,48	6.000.000
		2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	0
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	534.416.734	533.120.558	99,76	100,00	1.296.176
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	24.529.000	24.529.000	100,00	100,00	0
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.872.300	110.090.938	99,30	100,00	781.362
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.900.000	41.892.000	99,98	100,00	8.000
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.647.434	50.635.031	99,98	100,00	12.403
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.468.000	8.000.000	94,47	100,00	468.000
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.000.000	297.973.589	99,99	100,00	26.411

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp.)
		7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0	0
		8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0	0	0
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	965.738.875	770.515.200	79,79	95,45	195.223.675
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	965.738.875	770.515.200	79,79	95,45	195.223.675
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642.773.180	641.237.345	99,76	100,00	1.535.835
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	0
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	284.958.380	283.497.895	99,49	100,00	1.460.485
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.814.800	354.739.450	99,98	100,00	75.350
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	452.260.800	451.868.955	99,91	100,00	391.845
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.494.800	296.192.900	99,90	100,00	301.900
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.610.000	67.538.480	99,89	100,00	71.520
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.156.000	88.137.575	99,98	100,00	18.425
Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	a. IKU		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	857.575.300	824.218.038	96,11	100,00	33.357.262
	b. IKA		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	857.575.300	824.218.038	96,11	100,00	33.357.262
	c. IKAL	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	857.575.300	824.218.038	96,11	100,00	33.357.262

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp.)
	d. IKEG		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.273.951.166	1.246.047.211	97,81	100,00	27.903.955
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.169.722.166	1.142.190.291	97,65	100,00	27.531.875
		1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	120.000.050	117.298.899	97,75	100,00	2.701.151
		2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.049.722.116	1.024.891.392	97,63	100,00	24.830.724
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	104.229.000	103.856.920	99,64	100,00	372.080
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	38.469.000	38.244.050	99,42	100,00	224.950
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	65.760.000	65.612.870	99,78	100,00	147.130
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	238.229.325	237.038.800	99,50	100,00	1.190.525
			Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	238.229.325	237.038.800	99,50	100,00	1.190.525
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	238.229.325	237.038.800	99,50	100,00	1.190.525
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	750.834.759	744.918.483	99,21	100,00	5.916.276
			Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	750.834.759	744.918.483	99,21	100,00	5.916.276

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp.)
		1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	591.754.659	585.854.985	99,00	100,00	5.899.674
		2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	0	0	0	0,00	0
		3	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	134.511.400	134.494.798	99,99	100,00	16.602
		4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	24.568.700	24.568.700	100,00	100,00	0
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.022.000.000	1.923.402.912	95,12	100,00	98.597.088
			Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	500.000.000	466.363.223	93,27	100,00	33.636.777
		1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	500.000.000	466.363.223	93,27	100,00	33.636.777
			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	1.522.000.000	1.457.039.689	95,73	100,00	64.960.311
		1	Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1.522.000.000	1.457.039.689	95,73	100,00	64.960.311
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	195.000.000	186.975.894	95,89	100,00	8.024.106

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp.)
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	195.000.000	186.975.894	95,89	100,00	8.024.106
		1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	195.000.000	186.975.894	95,89	100,00	8.024.106
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	297.880.000	286.606.306	96,22	100,00	11.273.694
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	297.880.000	286.606.306	96,22	100,00	11.273.694
		1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	173.640.000	164.000.680	94,45	100,00	9.639.320
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	124.240.000	122.605.626	98,68	100,00	1.634.374
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	468.258.420	467.995.920	99,94	100,00	262.500
			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	468.258.420	467.995.920	99,94	100,00	262.500
		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	468.258.420	467.995.920	99,94	100,00	262.500
			TOTAL	23.125.384.218	22.569.449.279	97,60	99,85	555.934.939

Sumber : LPPK DLH Provinsi Jambi, 2023

Realisasi anggaran masing-masing program pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp17.021.655.248,- dan terealisasi sebesar Rp16.652.245.715,- atau sebesar 97,83%. Capaian output fisiknya 98,67%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian nilai AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp857.575.300,- dan terealisasi sebesar Rp824.218.038,- atau sebesar 96,11%. Capaian output fisiknya 100%.

c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp1.273.951.166,- dan terealisasi sebesar Rp1.246.047.211,- atau sebesar 97,81%. Capaian output fisiknya 100%.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp238.229.325,- dan terealisasi sebesar Rp237.038.800,- atau sebesar 99,50%. Capaian output fisiknya 100%.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp750.834.759,- dan mampu direalisasikan sebesar Rp744.918.483,- atau sebesar 99,21%. Capaian output fisiknya 100%.

a. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp2.022.000.000,- dan mampu diserap sebesar Rp1.923.402.912,- atau sebesar 95,12%.

b. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp195.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp186.975.894,- atau sebesar 95,89%. Capaian output fisiknya 100%.

c. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp297.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp286.606.306,- atau sebesar 96,22%. Capaian output fisiknya 100%.

d. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp468.258.420,- dan terealisasi sebesar Rp467.995.920,- atau sebesar 99,94%. Capaian output fisiknya 100%.

Seluruh program urusan lingkungan hidup selain program penunjang urusan pemerintah daerah, berkontribusi terhadap pencapaian nilai indeks kualitas udara, indeks kualitas air, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas ekosistem gambut.

Serapan anggaran dari 39 subkegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023 bervariasi satu sama lainnya, hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap kegiatan berbeda-beda. Secara garis besar realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
DLH TAHUN 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
A	Pendapatan	2.876.490.200	2.325.415.745	80,84
B	Belanja	23.125.384.218	22.569.449.279	97,60
	1. Belanja tidak Langsung	14.120.298.459	13.965.453.534	98,90
	2. Belanja Langsung	9.005.085.759	8.603.995.745	95,55
C	Surplus / (Defisit)	26.001.874.418	24.894.865.024	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DLH Provinsi Jambi, 2023

Penjabaran dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

PROGRAM NON URUSAN

Program non urusan (rutin) terdiri dari 1 program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah. Program ini dijabarkan menjadi 7 kegiatan dan 24 subkegiatan (termasuk penyediaan gaji dan tunjangan). Total anggaran untuk 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah ini sebesar Rp17.021.655.248,- dan terealisasi sebesar Rp16.652.245.715,- atau sebesar 97,83%. Sebagian besar output kegiatan telah dilaksanakan hampir 100% (98,67%).

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke dalam dan ke luar organisasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di sekretariat yaitu :

1. Banyaknya jumlah pegawai yang mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi dan kenaikan tunjangan fungsional menyebabkan ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan kurang.
2. Penawaran diklat yang masuk ke DLH kebanyakan diklat teknis yang berbayar sementara anggaran untuk ikut serta diklat terbatas.
3. Kegiatan ada yang pelaksanaannya terlambat bahkan tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan ketidaksesuaian anggaran dengan spesifikasi pengadaan barang/jasa.

Solusi untuk permasalahan di atas adalah :

1. Pengajuan nota dinas untuk penambahan anggaran.
2. Peningkatan anggaran diklat untuk tahun berikutnya.
3. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dalam kerangka acuan kerja yang baru dalam APBD Pergeseran.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP		B (63,5)	BB (78,75)	17.021.655.248	16.652.245.715		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	laporan/ dokumen	24	24	229.260.000	221.396.133		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	89.675.000	84.588.322	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	dokumen	3	3	7.660.000	7.660.000	Terdapat perubahan kebijakan dalam penganggaran misal perubahan standar harga	Penyesuaian anggaran dengan perubahan kebijakan
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	dokumen	3	3	7.625.000	7.150.500	-	-

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	dokumen	3	3	9.640.000	9.190.000	-	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	dokumen	3	3	6.730.000	6.730.000	-	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	6	6	45.440.000	44.116.651	-	-
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	laporan	2	2	62.490.000	61.960.660	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	laporan/ dokumen	35	35	14.147.728.459	13.990.630.324		

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	100	100	14.120.298.459	13.965.453.534	Adanya peraturan terkait kenaikan tunjangan fungsional	Pengajuan nota dinas untuk penambahan anggaran gaji dan tunjangan pada APBD Perubahan
2	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	2	2	27.430.000	25.176.790	Penggunaan aplikasi SIPD penatausahaan yang belum bisa maksimal	Penggunaan aplikasi pendamping SIMDA FMIS
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	orang	51	51	49.477.200	43.477.200		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	21	21	44.977.200	38.977.200	Penawaran diklat yang masuk ke DLH kebanyakan diklat teknis yang berbayar	Pergeseran anggaran untuk mengikuti diklat/bimtek berbayar
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	30	30	4.500.000	4.500.000	-	-

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	534.416.734	533.120.558		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	6	4	24.529.000	24.529.000	-	-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	5	2	110.872.300	110.090.938	-	-
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	700	850	41.900.000	41.892.000	-	-
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	4	12	50.647.434	50.635.031	-	-
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	dokumen	12	12	8.468.000	8.000.000	-	-

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	200	21	298.000.000	297.973.589	Beberapa acara rakor dan konsultasi tidak dapat diikuti secara langsung	Mengikuti acara rapat atau undangan secara virtual (via zoom meeting)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	23	13	965.738.875	770.515.200		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	23	22	965.738.875	770.515.200	Harga satuan 1 unit alat laboratorium ada yang melebihi harga satuan yang tercantum pada DPA	Pembatalan pengadaan 1 unit alat labor dan akan mengajukan kembali pada APBD Perubahan tahun berikutnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan	348	348	642.773.180	641.237.345		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	300	300	3.000.000	3.000.000	-	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	36	36	284.958.380	283.497.895	-	-

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	12	354.814.800	354.739.450	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	unit	103	103	452.260.800	451.868.955		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	16	19 (16 unit pajak dan 8 unit service)	296.494.800	296.192.900	-	-
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	82	82	67.610.000	67.538.480	Peralatan dan mesin yang rusak tidak dapat diperbaiki	Memasukkan peralatan dan mesin yang tidak bisa diperbaiki ke dalam kelompok aset rusak dan menganggarkan pengadaan pada tahun berikutnya
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	2	88.156.000	88.137.575	-	-

PROGRAM URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ada 8 program. Capaian Kinerja Program/Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Perencanaan lingkungan hidup merupakan bagian awal dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program perencanaan lingkungan hidup bertujuan untuk mengendalikan dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup. Salah satu subkegiatan yang mendukung program ini pada tahun 2023 adalah subkegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. Output yang dicapai dari subkegiatan ini adalah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD. Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah keterlambatan pengajuan pertanggungjawaban untuk penyusunan DIKPLHD. Dalam pelaksanaan KLHS banyak mengalami kendala di antaranya :

- Pemahaman KLHS pada tingkat pengambil kebijakan masih rendah;
- Keterbatasan data dan informasi pendukung rekomendasi dalam KLHS;
- Sulitnya membentuk tim KLHS/Pokja KLHS karena sebagai tim *ad hoc* maka kegiatan ini tidak menjadi fokus kegiatan.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kualitas perencanaan lingkungan hidup sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan	%	100	100	857.575.300	824.218.038		
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	dokumen	2	2	857.575.300	824.218.038		
1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD yang disusun	dokumen	2	2	857.575.300	824.218.038	-	-

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan adalah salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sangat beralasan karena indikator program (outcome) yang ingin dicapai dalam periode RENSTRA 2021-2026 adalah tersajinya data kondisi kualitas lingkungan hidup Provinsi Jambi secara keseluruhan yang meliputi aspek kualitas air, udara, air laut dan ekosistem gambut.

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp1.273.951.166,- dan terealisasi sebesar Rp1.246.047.211,- atau sebesar 97,81%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) Provinsi Jambi Tahun 2023, yang didukung oleh beberapa kegiatan. Nilai IKA dan IKU ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan bidang lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jambi maupun Perangkat Daerah terkait juga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan program di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka perbaikan optimalisasi kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini, antara lain :

1. Pemantauan kualitas lingkungan dilaksanakan dalam bentuk pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan melakukan pemantauan terhadap kualitas air (sungai Batanghari) sebanyak 2 kali di 6 kab/kota (12 titik), pemantauan terhadap kualitas air sungai Pengabuan sebanyak 2 kali di Kab. Tanjung Jabung Barat (3 titik) dan pemantauan kualitas udara ambien sebanyak 2 kali di 11 kab/kota (4 titik yaitu transportasi, industri/agro industri, pemukiman, dan perkantoran/komersial). Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah keterlambatan pelaksanaan pemantauan karena menunggu

kejelasan APBD Perubahan terkait biaya analisa sampel, sehingga Laporan Hasil Uji Sampel terlambat.

2. Kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup

Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilaksanakan dalam bentuk memberikan layanan pengujian kualitas air, udara dan tanah yang berasal dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, perseorangan dan akademika. Layanan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sasaran dari kegiatan UPTD laboratorium lingkungan ini menjadikan Laboratorium Lingkungan di Provinsi Jambi yang unggul dan profesional dalam layanan pengujian kualitas lingkungan bagi pengguna jasa dan mampu menyediakan data kualitas lingkungan di Provinsi Jambi guna mendukung sasaran strategi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Jumlah sampel yang masuk selama tahun 2023 sebanyak 1.846 sampel, lebih kecil dari tahun 2022 sebanyak 3.452 sampel. Sedangkan, target penerimaan retribusi jasa laboratorium Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.876.490.200,- dan realisasi per 31 Desember sebesar Rp2.325.415.745,- (8,84%). Realisasi tahun 2023 ini belum mencapai target dan mengalami penurunan dari tahun 2022 yang penerimaannya sebesar Rp3.217.807.560,-.

Penurunan terjadi dikarenakan sekitar 3 bulan laboratorium lingkungan hidup tidak menerima layanan pengujian sampel karena masih dalam proses reakreditasi laboratorium lingkungan hidup yang akreditasinya dibekukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran meliputi

- Pelaksanaan rapat koordinasi/ FGD pengendalian kabakaran lahan dan hutan

- Mengikuti rapat kerja teknis pencemaran dan kerusakan lingkungan Tahun 2023
- Inventarisasi pemulihan lahan bekas terbakar (lahan gambut dan hutan) di Provinsi Jambi dilaksanakan di 6 kab/kota, yaitu Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Tanjabbar, dan Kab. Tanjabtim.

Wilayah yang memiliki dampak besar dengan adanya kerusakan gambut adalah Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjabbar, dan Kab. Tanjabtim, karena ketiga wilayah ini memiliki luasan gambut yang besar.

Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah kesulitan memperoleh data dari kab/kota yang memiliki lahan gambut dan lahan bekas terbakar karena tidak tersedianya data di kab./kota tersebut. Inventarisasi lahan gambut dan lahan bekas terbakar telah dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan.

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar meliputi
 - a. Pelaksanaan rapat koordinasi pemulihan LAT di Kecamatan Pangkalan Bambu, Kabupaten Merangin. Hasil kegiatan ini Desa Tanjung Bungo Kec. Pangkalan Bambu mengajukan proposal pemulihan LAT ke KLHK RI.
 - b. Pelaksanaan koordinasi/inventarisasi eksisting LAT (Lahan Akses Terbuka) di Kab. Tebo, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Bungo, dan Kab. Tebo. Semua memiliki potensi lahan akses terbuka akibat adanya aktivitas PETI dan galian C.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	poin	IKLH = 64,09 (IKU 84,42; IKA 61,19; IKAL 77,19; IKEG 73,89)	IKU 89,85; IKA 50,67; IKAL 81,67	1.273.951.166	1.246.047.211		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	titik	15	15	1.169.722.166	1.142.190.291		
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	12	12	120.000.050	117.298.899	-	-
2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	laporan	4200	1846	1.049.722.116	1.024.891.392	Pembekuan akreditasi laboratorium lingkungan	Melakukan pelatihan SDM, pengadaan alat labor, pemeliharaan alat labor yang rusak

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
		Besaran Target PAD per tahun		Rp2.876.490.200	Rp2.325.415.745				
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	lokasi	10	9	104.229.000	103.856.920		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	dokumen	2	2	38.469.000	38.244.050	Tidak tersedianya data yang diminta ke kab/kota yang memiliki lahan gambut dan lahan bekas terbakar	1.) Melaksanakan sosialisasi pengendalian karhutla terhadap masyarakat dan usaha/kegiatan. 2.) Melakukan follow up terkait ketersediaan data
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	dokumen	2	2	65.760.000	65.612.870	-	-

c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Pengelolaan B3 dan LB3 terhadap pelaku usaha sebanyak 6 perusahaan.

Pelaksanaan pembinaan terhadap dunia/usaha transporter dan pengumpul Limbah B3 di wilayah Provinsi Jambi dilakukan terhadap 6 perusahaan. Tujuan kegiatan ini agar terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang menggunakan B3 dan limbah B3 dalam menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan diharapkan terkendalinya lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Jambi. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan 6 perusahaan tersebut sudah melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan, yaitu 3 perusahaan pengumpul Limbah B3 (PT. Anggrek Jambi Makmur, PT. Kenali Indah Sejahtera dan PT. Surya Cipta Wisesa), dan 3 perusahaan pengangkut Limbah B3 (PT. Anggrek Jambi Makmur, PT. Kenali Indah Sejahtera, dan PT. Surya Cipta Wisesa).

2. Penyusunan dokumen kedaruratan pengelolaan B3 dan Limbah B3 Provinsi Jambi :

- *Kick Off* Penyusunan Dokumen Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- Sosialisasi Penyusunan Dokumen Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- Bimtek Penyusunan Dokumen Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 dengan pendamping yang ditunjuk oleh KLHK

- Pembentukan Pokja Penyusunan Dokumen Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- Pengambilan data ke 11 kab/kota
- FGD/konfirmasi data ke BPBD
- Presentasi Dokumen Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

3. Pengelolaan Insenerator Limbah B3 Medis

- Pelaksanaan penghijauan di sekitar lokasi fasilitas layanan insenerator Limbah B3 Medis
- Pendampingan Gubernur ke lokasi fasilitas layanan insenerator Limbah B3 Medis
- Pendampingan KLHK RI lokasi fasilitas layanan insenerator Limbah B3 Medis
- Mengikuti Bimtek pengelolaan Limbah B3 bagi Provinsi yang menerima bantuan KLHK RI
- Mengikuti pelatihan penggunaan mesin insenerator Limbah B3 Medis
- Pelaksanaan uji tahap TBT insenerator Limbah B3 Medis
- Pemberian rekomendasi dalam penyusunan dokumen lingkungan
- Pembahasan dokumen lingkungan oleh konsultan
- Penandatanganan kesepakatan dan penyerahan asset berupa bangunan dan kendaraan antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan KLHK RI.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3	%	100	100	238.229.325	237.038.800		
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	perusahaan	5	6	238.229.325	237.038.800		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewangannya	dokumen	22	22	238.229.325	237.038.800	-	-

d. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Tujuan dari program ini adalah melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga menurunkan beban pencemaran dari usaha/kegiatan yang dipantau atau diawasi dan mengetahui tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Fasilitasi penerbitan Surat Persetujuan Pertanyaan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 32 badan usaha (18 sudah selesai).
 2. Fasilitasi persetujuan teknis sebanyak 8 badan usaha (2 sudah selesai)
 3. Fasilitasi penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebanyak 8 badan usaha (7 sudah selesai)
- Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Hasil dari pembinaan dan pengawasan tersebut telah diambil kebijakan-kebijakan berupa saran dan tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan mengevaluasi komitmen pemrakarsa terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Uraian	Target					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi	50	20	11	23	13	53	17	19	19	17
2.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang dibina (pendampingan)	-	-	-	-	-	-	9	2	1	18
3.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang taat	-	-	5	-	-	-	9	5	17	28

Sumber : Bidang Petaan, Tahun 2023

Jumlah perusahaan telah dilakukan pengawasan terhadap ketaatan dan pendampingan tahun 2023 sebanyak 35 usaha/kegiatan dari target 13 usaha/kegiatan.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	76	80	750.834.759	744.918.483		
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan untuk pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	perusahaan	13	35	750.834.759	744.918.483		
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan	dokumen	13	27	591.754.659	585.854.985	-	-
2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	orang	15	4	0	0	Tidak ada anggaran	PPLH mengikuti diklat dengan anggaran pribadi

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

3	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	dokumen	13	17	134.511.400	134.494.798	Kurangnya komitmen dunia usaha terhadap izin lingkungan yang diberikan	Memberikan sanksi yang sesuai kepada kegiatan usaha yang terbukti lalai dalam mentaati izin lingkungan
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	dokumen	13	18	24.568.700	24.568.700	Perbedaan pemahaman PPLH terhadap peraturan perundang-undangan	Penguatan kompetensi PPLH

e. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Subkegiatan yang mendukung program ini adalah

- Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH. Pelaksanaan sub kegiatan ini meliputi :
 - i) pengajuan draft naskah akademik dan draft Perda pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) : 1 kali
 - ii) penyusunan laporan lokakarya dan laporan hasil akhir kajian penilaian manfaat non karbon bagi MHA : 1 kali

Pada tahun 2023 target inventarisasi keberadaan MHA dan Kearifan Lokal terealisasi 29 MHA, dan sedang diajukan proses pengakuan MHA tersebut dalam Perda. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kesalahan dalam beberapa rincian anggaran sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi : pelaksanaan FPIC BSM di 30 lokasi, pelaksanaan FPIC lanjutan di 30 lokasi, pelaksanaan pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas sebanyak 2 kali, pelaksanaan pelatihan ESMF sebanyak 2 kali. Program kegiatan ini cenderung memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengendalikan aktivitas/kegiatan masyarakat yang menimbulkan emisi karbon.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	%	79	79	2.022.000.000	1.923.402.912		
	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	MHA	33	33	500.000.000	466.363.223		
1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	dokumen	2	2	500.000.000	466.363.223	-	-

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	Kelembagaan	33	33	1.522.000.000	1.457.039.689		
1	Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	dokumen	8	8	1.522.000.000	1.457.039.689		

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Subkegiatan yang mendukung program ini meliputi Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. Pelaksanaan subkegiatan ini antara lain :

- Pembinaan dan penilaian Kampung Iklim
- Pembinaan dan penilaian Sekolah Adiwiyata
- Pembinaan Kalpataru
- Pembinaan Saka Kalpataru

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Subkegiatan yang mendukung program ini meliputi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan. Pelaksanaan subkegiatan ini antara lain :

1. Jumlah kasus yang masuk ke pos pengaduan Dinas LH tahun 2023 sebanyak 13 kasus. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu 24 kasus. Kasus yang masuk telah 100% diselesaikan.
2. Kegiatan penataan hukum lingkungan telah dilaksanakan terhadap berbagai usaha/kegiatan yang dapat berakibat munculnya berbagai bentuk pencemaran lingkungan, sehingga diperlukan suatu usaha untuk menata dan melakukan penegakan hukum lingkungan. Tujuan dari kegiatan ini merupakan usaha pemerintah untuk menata dan mengelola lingkungan dari berbagai bentuk pencemaran baik air, udara maupun pencemaran limbah B3 serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan tingkat kesalahannya meliputi penegakan hukum administratif, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Pada tahun 2023 ini, jumlah rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan (penegakan hukum), jumlah verifikasi tindak lanjut

hasil pengawasan LH dan pengaduan LH dilaksanakan terhadap 26 perkara. Realisasi kegiatan ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 18 perkara.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	%	100	100	297.880.000	286.606.306		
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terlaksananya tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup	kasus	18	13	297.880.000	286.606.306		
		Terlaksananya penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup	kasus	18	24				
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	dokumen	18	13	173.640.000	164.000.680	1.) Masyarakat belum begitu memahami SOP pengaduan lingkungan, 2.) Budaya masyarakat yang merasa khawatir akan kerahasiaan identitas pengadu.	1.) Dinas LH akan kerjasama dengan diskominfo terkait aplikasi satu pintu yang dikembangkan yaitu SP4N Lapor, serta pembuatan dan penyebaran pamflet terkait SOP dan hotline pengaduan lingkungan, 2.) Pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pengaduan lingkungan.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	dokumen	18	24	124.240.000	122.605.626	1.) Rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan tidak sesuai dengan jadwal 2.) Adanya kasus yang tidak bisa langsung ditangani ke tingkat penyidikan	1.) Mempercepat persiapan bahan rapat tindak lanjut hasil pengawasan 2.) Pengajuan usulan untuk mengisi jabatan fungsional PPNS ke BKD
---	---	--	---------	----	----	-------------	-------------	--	---

h. Program Pengelolaan Persampahan

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Pelaksanaan monitoring Jakstrada di 11 kab/kota dan Pembinaan kabupaten/kota terkait pengelolaan sampah (TPS3R)
2. Penyusunan Petunjuk Teknis Program Kampung MANTAP LH.
3. Bimtek koordinasi lapangan Kampung MANTAP LH 11 kab/kota.
4. Pelaksanaan pembinaan dan penilaian Kampung Mantap LH sebagai salah satu wujud pencanangan program Batanghari Bersih. Sosialisasi Kampung Mantap oleh Dinas Lingkungan hidup Provinsi Jambi di 25 lokasi (22 desa di 11 Kab/Kota dan 3 perusahaan). Penilaian Kampung Mantap LH oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilakukan terhadap 22 desa di 11 Kab/Kota, dimana 11 desa merupakan hasil pembinaan Provinsi dan 11 desa merupakan hasil pembinaan Kabupaten/Kota.

Target Jakstrada Provinsi Jambi untuk pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga tahun 2023 sebesar 26%, sedangkan target untuk penanganannya sebesar 72%. Realisasi pengurangan sampah Tahun 2022 sebesar 22% dan realisasi penanganan sampah sebesar 68,67%. Program ini dilaksanakan untuk membuka wawasan dan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah di Provinsi Jambi.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	%	26	22,0	468.258.420	467.995.920		
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan pengurangan sampah secara regional	ton/ tahun	183,738,86		468.258.420	467.995.920		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang disusun dan ditetapkan	dokumen	4	4	468.258.420	467.995.920		

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feedback* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi program/kegiatan Tahun 2023 dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terlaksana sebesar 94,08%. Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi belum mencapai target output 4200 laporan, hanya terealisasi 1846 laporan.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - Program Perencanaan Lingkungan Hidup terlaksana sebesar 100%.
 - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) terlaksana 100%.
 - Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH terlaksana sebesar 100%.
 - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat terlaksana sebesar 100%.
 - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup terlaksana sebesar 100%.
 - Program pengelolaan persampahan terlaksana sebesar 100%.

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah terlaksana sebesar 124,02%.
- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebesar 105,26%.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

- Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
 - ❖ Keterlambatan keluarnya pengesahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
 - ❖ Adanya perubahan-perubahan aturan terkait lingkungan hidup
- Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
 - ❖ Komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara lingkup DLH Provinsi Jambi untuk merealisasikan target output dan outcomes dengan dukungan anggaran.
 - ❖ Terlaksananya evaluasi dan pengendalian kegiatan dari pimpinan kepada bawahan lingkup DLH Provinsi Jambi.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, antara lain :

- Terselenggaranya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Penambahan anggaran pada perubahan menyebabkan waktu untuk melaksanakan program/kegiatan tidak cukup mengakibatkan target capaian kinerja program dan kegiatan tidak terlaksana sesuai perencanaan awal.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain :

- Selalu mengupayakan adanya koordinasi dan komunikasi secara intensif antar semua komponen di Dinas Lingkungan Hidup dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan agar dapat berjalan dengan lebih baik.
- Mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
- Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM agar lebih kompeten sesuai tugas dan fungsinya untuk pencapaian output dan outcomes.
- Atasan langsung memantau/memonitor perkembangan kegiatan dan pencapaian target baik dari sisi penyerapan dana maupun kualitas sasaran kegiatannya dengan membuat agenda kerja untuk setiap pelaksanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan hasil kegiatan.

Adapun secara lebih rinci terkait dengan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja 2023 dan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2024 tertuang dalam Tabel 3.

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

TABEL 3
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA DLH PROVINSI JAMBI S/D TAHUN 2024

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)*	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B (65) B (65)	B (69,95)	B (63,5)	BB (78,75)	124,02%	B (64)	BB (78,75)	100%
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	123 laporan/dokumen	16	24	24	100%	25	65	53%
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 dokumen	4	4	4	100%	4	12	60%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15 dokumen	3	3	3	100%	3	9	60%
2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15 dokumen	3	3	3	100%	3	9	60%
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15 dokumen	3	3	3	100%	3	9	60%
2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15 dokumen	3	3	3	100%	3	9	60%
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 laporan	7	6	6	100%	6	19	63%
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 laporan	1	2	2	100%	3	6	46%
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	175 laporan/ dokumen	35	35	35	100%	35	105	60%
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 orang/ bulan	101	103 orang (14 bulan)	103 orang (14 bulan)	100%	115	115	96%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 laporan	2	2	2	100%	2	6	60%
2.11.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	25 dokumen	5	5	5	100%	5	15	60%
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	70 laporan	14	14	14	100%	14	42	60%
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	150 orang	28	51	49	96,08%	160	160	107%
2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	680 -	0	0	0	0%	175	175	26%
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 orang	28	21	19	90%	4	51	268%
2.11.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175 orang	0	30	30	100%	35	65	37%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	310 orang	0	0	0	0%	65	65	0
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100	100	100	100%	100	100	100%
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 paket	4	6	6	100%	10	20	40%
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	195 paket	2	5	5	100%	40	47	24%
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4800 orang	850	700	855	1	1000	2705	56%
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 paket	12	4	4	100%	12	28	47%
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 dokumen	12	12	12	100%	12	36	60%
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	610 laporan	21	200	53	27%	200	274	45%
2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16 laporan	2	3	3	100%	3	8	50%
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 dokumen	0	1	1	100%	2	3	33%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	132 unit	13	23	22	96%	27	62	27%
2.11.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 unit	0	0	0	0%	3	3	27%
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	95 unit	0	0	0	0%	19	19	20%
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	9	23	22	96%	4	35	175%
2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	4	0	0	0%	1	5	83%
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1490 laporan	348	348	348	100%	298	994	67%
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1250 surat	300	300	300	100%	250	850	68%
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 bulan	36	36	36	100%	36	108	60%
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 bulan	12	12	12	100%	12	36	60%
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	136 unit	103	99	99	100%	120	133	98%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23 unit	0	0	0	0%	21	21	91%
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	19	16	16	100%	9	19	211%
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	82	82	82	100%	88	88	96%
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 unit	2	1	1	100%	2	5	42%
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100 %	100	100	100	100%	100	100	100%
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi disusun	11 dokumen	1	0	0	0%	2	3	27%
2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun	3 dokumen	1	0	0	0%	0	1	33%
2.11.02.1.01.0005	Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi Jambi yang ditetapkan	1 dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	1 dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	8 dokumen	0	0	0	0%	2	2	25%
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	24 dokumen	0	2	2	100%	7	9	38%
2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	5 dokumen	0	0	0	0%	1	1	20%
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD yang disusun	3 dokumen	0	2	2	100%	1	3	100%
2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	3 dokumen	0	0	0	0%	1 dokumen (Peninjauan Kembali)	1	33%
2.11.02.1.02.0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun	15 dokumen	0	0	0	0%	4	4	27%
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	IKA : 61,59 IKU : 84,82 IKAL : 79,79 IKEG : 75,89 poin		IKA : 61,59 IKU : 84,82 IKAL : 79,79 IKEG : 75,89	IKA : 61,59 IKU : 84,82 IKAL : 79,79 IKEG : 75,89		IKU : 84,62 IKA : 61,39 IKAL : 78,49 IKEG : 74,89	IKEG : 74,39	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	94 titik	24	30	30	100%	30	74	79%
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	42 dokumen	12	12	12	100%	12	36	86%
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	30 dokumen	0	0	0	0%	6	6	20%
2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut)	18 lokasi	0	0	0	0%	6	6	33,33%
2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	4 dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%
2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 dokumen	0	0	0	0%	1	1	50%
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	21840 dokumen	3452	4200	1846	43,95%	4680	9978	46%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	10 lokasi	9	10	10	100%	10	33	330%
2.11.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	60 dokumen	2	2	2	100%	12	16	27%
2.11.03.1.03.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kab/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	22 kegiatan	5	2	2	100%	4	11	50%
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi	100% %	0	0	0	0%	100	100	100%
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun	5 dokumen dokumen (Perda/ Pergub)	0	0	0	0%	1	1	100%
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	5 dokumen	0	0	0	0%	1	1	20%
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	18,5 Ha	0	0	0	0%	18,5	18,5	100%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	100%	%	5 dokumen	5	5	100%	100	100	100%
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	6	perusahaan	6	5	5	100%	5	6	100%
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5	dokumen	0	0	0	0%	1	1	20%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	109 dokumen	5	22	22	100%	22	49	45%
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	86% (60 perusahaan) %	0	76	80,00	105%	77	12	#VALUE!
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	70 usaha/kegiatan	19	13	35	269	70	25	36%
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen	27	13	20	154%	25	83	415%
2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	15 orang	12	0	0	0%	15	86%	79%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	80	badan usaha	19	13	17	131%	70	33	41%
2.11.06.1.01.0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	33	dokumen	0	0	0	0%	11	11	33%
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	100%	64,28% (27 MHA)	76	79	79	100%	86	86	100%
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	42	MHA	30	33	33	100%	36	36	86%
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	55	dokumen	11	2	2	0	11	24	44%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	42	kelembagaan	30	33	33	0	36	36	86%
2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	42	dokumen	6	8	8	0	36	36	86%
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina	80	%	0	60	60	100%	70	70	88%
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	5	kali	0	4	4	100%	4	4	100%
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	58	dokumen	0	4	4	100%	22	26	45%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	525 orang	0	0	0	0%	100	100	19%
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	100% %	0%	0	0%	0%	100%	100%	100%
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan	30 kategori	0	0	0	0%	6	6	20%
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	30 entitas	0	0	0	0%	6	6	20%
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	100% %	100	100	100	100%	100%	100	100%
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan	19 kasus	24	18	13	100%	17	54	100%
		Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan	28 kasus	24	18	26	144%	23	73	100%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	85 pengaduan	24	18	13	100%	17	54	64%
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	133 perkara	24	18	26	144%	23	73	55%
2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	37 perkara	0	0	0	0%	10	10	27%
2.11.10.1.01.0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	12 perkara	0	0	0	0%	4	4	33%
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	30 %	22,00	27	22,00	81,48%	28%	22,00	73%
		Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi	70 %	68,67	73	68,67	94,07%	71%	68,67	98%
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pengurangan sampah secara regional	224.982,86 ton/tahun	51.891,65	194.621,85	51.891,65	26,66%	205.866,67	51.891,65	23%
		Jumlah penanganan sampah secara regional	524.960,00 ton/tahun	161.945,53	518.991,60	161.945,53	31,20%	522.019,05	161.945,53	31%

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Provinsi yang disusun dan ditetapkan	61 dokumen	8	4	4	100%	13	25	41%
2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional	Jumlah fasilitas TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	3 unit	0	0	0	0%	1	1	33%
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	8 dokumen	0	0	0	0%	2	2	25%
2.11.11.1.01.0006	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	524.960,00 ton	0	0	0	0%	522.019,05	522019,05	99%
2.11.11.1.01.0010	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	11 dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%
2.11.11.1.01.0011	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/ kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/ kota	11 dokumen	0	0	0	0%	0	0	0%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 pada misi 2, yaitu **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”**. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai misi ke-5 RPJMD Provinsi Jambi selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah terwujudnya sumber lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas udara, air, air laut, dan ekosistem gambut
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) RPJMN 2020-2024 terdiri dari 5 komponen yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Tutupan Lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Target setiap komponen terdiri atas :

- a. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara 84,1 – 84,5
- b. Meningkatnya Indeks Kualitas Air 55,1 – 55,5
- c. Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan 61,6 – 65,5
- d. Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut 58,5 – 60,5

Berdasarkan rincian komponen tersebut ditetapkan target IKLH 2020-2024 yaitu 68,71-69,74.

Tabel 4
INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-			Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI														
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$	71,7	72,07	72,44	72,8	73,17	73,53	69,04	70,32	-	72,8	73,17	Pengukuran IKK Urusan LH sesuai dengan Permendagri No.18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengukuran IKLH berdasarkan Permenlhk No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten X 100% Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan	61%	70%	76%	77%	79%	86%	61%	68,42%	-	77%	79%	Pengukuran IKK Urusan LH sesuai dengan Permendagri No.18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA														
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EV} - 0,1) \right)$	84,31	84,42	84,52	84,62	84,72	84,82	87,08	89,85	-	84,62	84,72	Pengukuran IKLH berdasarkan Permenlhk No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_{ij}}{L_{ij}}\right)^2_M + \left(\frac{C_{ij}}{L_{ij}}\right)^2_R}{2}}$	61,09	61,19	61,29	61,39	61,49	61,59	48,96	49,49	-	61,39	61,49	Pengukuran IKLH berdasarkan Permenlhk No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	$WQI = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$	54,62	56,32	58,02	59,71	61,41	63,11	83,58	81,67	-	59,71	61,41	Pengukuran IKLH berdasarkan Permenlhk No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
4	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	IKEG = (0,6 x IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut) + (0,4 x IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut)	73,39	73,89	74,39	74,89	75,39	75,89	71,1	71,1	-	74,89	75,39	Pengukuran IKLH berdasarkan Permenlhk No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

5	Nilai SAKIP			62,5 (B)	63 (B)	63,5 (B)	64 (B)	64,5 (B)	65 (B)	69,25 (B)	69,95 (B)	78.75 (BB)	64 (B)	64,5 (B)	IKU TAMBAHAN
6	IKM			83	83,25	83,50	83,75	84	84,25	84,03	84,55	84,55	83,75	84	

Sumber : Laporan Monev Kinerja, 2022

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Beban lingkungan di wilayah Provinsi Jambi dalam mendukung keberlanjutan pembangunan semakin berat. Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus-menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut. Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan ini disebabkan beberapa isu lingkungan hidup strategis yang menonjol di wilayah Provinsi Jambi antara lain :

1. Isu implementasi perencanaan TPB, dengan permasalahan belum tercapainya TPB bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.
2. Isu kualitas lingkungan dan kerusakan SDA, dengan permasalahan :
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI;
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
3. Isu pengelolaan sampah dan LB3, dengan permasalahan :
 - a. Masih besarnya jumlah timbunan sampah
 - b. Meningkatnya limbah medis khususnya limbah Covid-19
 - c. Kesadaran Masyarakat untuk mengurangi dan menangani timbunan sampah belum optimal
4. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan.

Seluruh isu ini harus ditangani secara bersama oleh lembaga-lembaga yang masing-masing lembaga dengan kerjasama dan kemitraan yang kuat, maka diharapkan pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi akan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai sasaran serta memberikan kontribusi positif. Penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pandangan, harapan dan permasalahan yang ada harus mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan RKPD Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2023 lebih dititikberatkan pada pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan upaya-upaya untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola lingkungan yang meliputi Penyusunan dan Penetapan RPPLH dan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKLHD).
2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan yang meliputi Penyusunan KLHS.
3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan, meliputi pemantauan kualitas udara ambien, air sungai, danau, air laut, ekosistem gambut, koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor LH, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, identifikasi lahan bekas terbakar dan lahan gambut, dan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian LB3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R, meliputi penyusunan rencana pengelolaan sampah Regional, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional, dan penyusunan dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional.
5. Penegakan hukum lingkungan hidup, meliputi fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH, pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur, peningkatan kapasitas PPLHD di Provinsi Jambi, dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan LH melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH, meliputi pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH; pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya LH; dan penyuluhan dan kampanye LH; Pembinaan dan penilaian ADIPURA, Kalpataru, Kampung Iklim, Adiwiyata, dan PROPER.
7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan meliputi pelayanan pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan, pelayanan pos pengaduan lingkungan serta pendayagunaan laboratorium lingkungan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan hasil pencapaian target tahunan. Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Selain itu, rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, subkegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya sesuai dengan Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Usulan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renja DLH Provinsi Jambi senantiasa diselaraskan dengan Renstra DLH Provinsi Jambi dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Perbandingan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan terdapat perbedaan yang signifikan pada program kegiatan serta target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Namun, tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan hasil capaian pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi OPD. Perbedaan tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

TABEL 6
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
PROVINSI JAMBI

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan
			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Predikat AKIP Perangkat Daerah	B (64,5)	22.007.550.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B (64,5)	19.371.225.097	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan/ dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	25 laporan/ dokumen	812.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	25 laporan/ dokumen	759.600.600	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	450.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	424.490.100	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	3.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	3.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	3.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dokumen	3.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	125.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	98.754.650	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	225.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	224.355.850	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	35 laporan/dokumen	17.018.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	35 laporan/dokumen	16.340.066.674	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Jambi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 orang/bulan	17.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 orang/bulan	16.322.066.674	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	5.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	5.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	5.000.000	
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen	3.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen	3.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 laporan	5.000.000	
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	150 orang	150.050.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	150 orang	148.720.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	175 -	113.750.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	175 -	112.420.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Jambi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	19.800.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	19.800.000	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	6.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	6.000.000	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	10.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	10.500.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.054.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	916.044.030	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	paket	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	paket	24.953.530	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	paket	199.953.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000	orang	80.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000	orang	79.550.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	65.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	64.997.500	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	4.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	4.500.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	laporan	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	laporan	312.140.000	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	laporan	30.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	laporan	30.000.000	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	dokumen	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	dokumen	199.950.000	
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	25	unit	1.040.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	25	unit	364.320.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Jambi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	400.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	235.320.000	
2	Pengadaan Mebel	Provinsi Jambi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 unit	300.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 unit	111.000.000	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	40.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	18.000.000	
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	300.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	298 laporan	753.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	298 laporan	630.764.393	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 surat	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 surat	3.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 bulan	450.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 bulan	449.999.593	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	300.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	177.764.800	
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	126 unit	1.180.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	126 unit	211.709.400	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Jambi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 unit	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 unit	0	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	79.984.800	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	74.955.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	105.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	56.769.600	
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100 %	2.000.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100 %	636.931.200	
II.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi disusun	2 dokumen	750.000.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi disusun	2 dokumen	252.519.200	
1	Penyusunan RPPLH Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun	0 dokumen	0	Penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun	0 dokumen	0	
2	Penetapan RPPLH Provinsi	Provinsi Jambi	Dokumen RPPLH Provinsi Jambi yang ditetapkan	1 dokumen	250.000.000	Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi Jambi yang ditetapkan	1 dokumen	7.519.200	
3	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi		Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	0 dokumen	0	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	0 dokumen	0	
4	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	1 dokumen	500.000.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	1 dokumen	245.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

II.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	5 dokumen	1.250.000.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	5 dokumen	384.412.000	
1	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 dokumen	500.000.000	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 dokumen	4.856.000	
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	1 dokumen	300.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	1 dokumen	2.600.000	
3	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Provinsi Jambi	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	1 dokumen	250.000.000	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	1 dokumen	245.000.000	
4	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun	2 dokumen	200.000.000	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun	2 dokumen	131.956.000	
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	IKA : 61,49 IKU : 84,72 IKAL : 79,14 IKEG : 75,39 poin	4.575.236.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	IKA : 61,49 IKU : 84,72 IKAL : 79,14 IKEG : 75,39 poin	3.044.208.903	
III.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	94 titik	4.055.236.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	94 titik	2.524.208.903	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6 dokumen	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6 dokumen	100.000.000	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 dokumen	250.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 dokumen	250.000.000	
3	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Provinsi Jambi	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut)	6 lokasi	355.236.000	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut)	6 lokasi	355.236.000	
4	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2 dokumen	250.000.000	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2 dokumen	250.000.000	
5	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 dokumen	200.000.000	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 dokumen	37.314.000	
6	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	4680 dokumen	2.900.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	4680 dokumen	1.531.658.903	
III.2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	10 lokasi	520.000.000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	10 lokasi	520.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	12 dokumen	315.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	12 dokumen	315.000.000	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kab/kota	Provinsi Jambi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	4 kegiatan	205.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kab/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	4 kegiatan	205.000.000	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanakeragaman hayati Provinsi Jambi	100% %	500.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanakeragaman hayati Provinsi Jambi	100% %	0	
IV.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun	1 dokumen (Perda / Pergub)	500.000.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun	1 dokumen (Perda / Pergub)	0	
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	150.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	0	
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	18,5 Ha	350.000.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	18,5 Ha	0	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	100 %	165.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	100 %	164.799.600	
V.1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	5 perusahaan	165.000.000	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	5 perusahaan	164.799.600	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Provinsi Jambi	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	15.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	14.800.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	22 dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	22 dokumen	149.999.600	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	79% (55 perusahaan)	1.365.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	79% (55 perusahaan)	1.269.680.200	
VI.1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	70 usaha/kegiatan	1.365.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	70 usaha/kegiatan	1.269.680.200	
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Provinsi Jambi	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen	325.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen	325.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	15 orang	150.000.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	15 orang	150.000.000	
3	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75 badan usaha	640.000.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75 badan usaha	544.680.200	
4	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	11 dokumen	250.000.000	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	11 dokumen	250.000.000	
VII	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	93% 64,28% (27 MHA)	400.000.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	93% 64,28% (27 MHA)	193.450.000	
VII.1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	39 MHA	250.000.000	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	39 MHA	102.460.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11 dokumen	11 kab/kota	250.000.000	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11 dokumen	11 kab/kota	102.460.000	
VII.2	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	39	kelembagaan	150.000.000	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	39	kelembagaan	90.990.000	
1	Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	39	dokumen	150.000.000	Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	39	dokumen	90.990.000	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina	80%	%	600.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina	80%	%	500.000.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

VIII.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	5 kali	600.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	5 kali	500.000.000	
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 dokumen	500.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 dokumen	400.000.000	
2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	125 orang	100.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	125 orang	100.000.000	
IX	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	100 %	850.000.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	100% %	0	
IX.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan	6 kategori	850.000.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan	6 kategori	0	
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Provinsi Jambi	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6 entitas	850.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6 entitas	0	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

X	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	100 %	1.350.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	100% %	432.814.000	
X.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan	18 kasus	1.350.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan	18 kasus	432.814.000	
			Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan	25 kasus			Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan	25 kasus		
1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi		Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	18 pengaduan	450.000.000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	18 pengaduan	227.272.000	
2	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	25 perkara	350.000.000	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	25 perkara	67.824.000	
3	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	12 perkara	350.000.000	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	12 perkara	42.200.000	
4	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P- 21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	4 perkara	200.000.000	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P- 21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	4 perkara	95.518.000	
XI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengurangan timbunan sampah di Provinsi Jambi	30% %	1.200.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbunan sampah di Provinsi Jambi	30% %	646.480.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

			Persentase penanganan timbunan sampah di Provinsi Jambi	70%			Persentase penanganan timbunan sampah di Provinsi Jambi	70%		
XI.1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Jumlah pengurangan sampah secara regional	224.9 ton/tahun 82,86	1.200.000.000	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pengurangan sampah secara regional	224.9 ton/tahun 82,86	646.480.000	
			Jumlah penanganan sampah secara regional	524.9 60,00			Jumlah penanganan sampah secara regional	524.9 60,00		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Provinsi yang disusun dan ditetapkan	11 dokumen	300.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Provinsi yang disusun dan ditetapkan	11 dokumen	220.360.000	
2	Pengoperasian dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional	Provinsi Jambi	Jumlah fasilitas TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	1 unit	400.000.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional	Jumlah fasilitas TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	1 unit	99.900.000	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	2 dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	2 dokumen	55.500.000	
4	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Jambi	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	524.96 ton 0,00	100.000.000	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	524.96 ton 0,00	112.160.000	
5	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Provinsi Jambi	Jumlah laporan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	11 dokumen	150.000.000	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	11 dokumen	9.990.000	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

6	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	11 dokumen	150.000.000	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	11 dokumen	148.570.000	
	TOTAL				35.012.786.000	TOTAL				26.259.589.000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat kabupaten yang ditindaklanjuti sampai dengan tingkat Provinsi, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan lingkungan hidup sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat belum tertuang dalam rancangan awal rencana kerja karena masih akan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan social budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Beberapa isu dan tantangan pembangunan lingkungan hidup ke depan, yaitu :

1. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan;
2. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau;

Isu global yang sedang dihadapi berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Tiga isu tersebut dikenal dengan *Triple Planetary Crisis*. Arah pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Prinsip tersebut sangat kuat terintegrasi ke dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yang terdiri dari 17 goals, 8 Agenda Perubahan, dan 45 Indikator.

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi salah satu dari 20 upaya transformasi super prioritas (*Game-Changer*). Untuk penurunan intensitas emisi GRK menjadi salah satu dari 5 sasaran utama untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Sementara untuk mencapai sasaran pembangunan 2045, diperlukan suatu transformasi ekonomi dengan strategi ekonomi hijau. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Berkaitan dengan pembangunan rendah karbon dan

berketahanan iklim menjadi *"backbone"* dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau.

Salah satu upaya dalam penguatan perencanaan pembangunan ke depan yaitu dengan mensinkronkan RPJPN dan RPJPD. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat menjadi jembatan analisis dalam merumuskan skenario kebijakan yang lebih tepat dan akurat dalam RPJPN/RPJPD, yang mana hasil dari KLHS memberikan rekomendasi terhadap penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) untuk beberapa bidang prioritas di dalam penyusunan RPJPN/RPJPD. Perencanaan lingkungan di daerah perlu selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan penyusunan KLHS RPJMD yang mengakomodir prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di daerah, alokasi anggaran terbesar yakni pada sub bidang persampahan dengan persentase lebih dari 50% total anggaran urusan lingkungan hidup. Salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di daerah adalah minimnya pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi daerah dan sumber-sumber pendanaan di luar APBD untuk dapat mendukung pengelolaan sampah yang baik di daerah.

Kebijakan Nasional bidang Lingkungan Hidup melalui Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjabarkan bahwa visi dan misi bidang Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2020-2024 adalah Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 memiliki empat pilar agenda kerja yaitu:

- Lingkungan Hidup dan Hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim (lingkungan)
- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan (ekonomi)
- Fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan (sosial)
- Tata Kelola dan Inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing (tata Kelola).

Untuk pilar lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan sasaran sebagai berikut :

- Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di angka 75 - 78 yang pada tahun sebelumnya (2018) berada di angka 71,67;
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 5 sektor menjadi 27% dari 24,7% pada tahun 2017;

- Penurunan laju deforestasi 0,31 juta hektar per tahun dari 0,44 juta hektar pada tahun 2018;
- Indeks Kinerja Pengelolaan sampah sebesar 80;
- Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk meningkatkan dukungan terhadap Ketahanan Pangan dan ketangguhan Bencana sebanyak 108 DAS serta rehabilitasi seluas 1,5 juta Ha;
- Perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi untuk memperkuat daya dukung dan daya tampung pembangunan nasional.

Pada pilar ekonomi termasuk pengembangan 15 kawasan konservasi untuk mendukung destinasi wisata nasional, sedangkan pada pilar tata kelola KLHK akan merencanakan memperkuat kualitas kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan diterapkan untuk diintegrasikan secara nyata dalam agenda kerja pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Selain itu sasaran tata kelola ditujukan untuk peningkatan indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan dan perairan, penyelesaian 263 kasus bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurangi pencemaran lingkungan serta peningkatan PNPB, selain itu integrasi satu sistem data dan informasi yang valid dan mudah untuk diakses. Pilar tata Kelola juga termasuk 100 produk hasil Litbang yang inovatif dan imlementatif, selain itu peningkatan nilai kinerja reformasi birokrasi, tata kelola keuangan yang baik serta penguatan SDM aparatur KLHK.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN Tahun 2005-2025 dengan RPJPN Tahun 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan Tahun 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk

tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi *window opportunity* bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Oleh karena itu, RKP Tahun 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Sementara itu, tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi :

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Sasaran pembangunan RKP 2025, antara lain meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju; mengurangi kemiskinan menuju nol persen; menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia serta pengaruh internasional. Selain pertumbuhan ekonomi, RKP 2025 juga menekankan pentingnya pembangunan manusia dan pengurangan ketimpangan. Pemerintah menargetkan tingkat

kemiskinan turun menjadi 7–8 persen dan rasio Gini menjadi 0,379–0,382 pada tahun depan. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial, dan mendorong konvergensi program antar lembaga. Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan jaminan sosial.

RKP Tahun 2025 juga berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 38,6 persen. Hal ini akan dicapai melalui penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon, seperti peningkatan efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan rancangan RKP 2025 ini, pemerintah berharap dapat mengatasi tantangan sosial-ekonomi secara lebih komprehensif dan mewujudkan pertumbuhan yang lebih inklusif serta berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Dikaitkan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) Prioritas yaitu :

1. Pembangunan SDM, sosial dan budaya
2. Pembangunan ekonomi
3. Pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar serta komunikasi dan informasi
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan, Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah dan Trantibum

Memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jambi tersebut di atas terlihat bahwa pembangunan lingkungan hidup dititikberatkan pada prioritas 4 (empat) yaitu **“Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana”** dengan fokus pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (26,8% - 27,1%). Strategi pembangunan yang dilakukan terkait hal tersebut dengan meningkatkan capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Pertumbuhan Hijau”**. Rencana penetapan tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam Prioritas-Prioritas Pembangunan Daerah yang nantinya dijadikan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan-kebijakan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025 serta diimplementasikan ke dalam APBD Tahun 2025. Adapun yang menjadi isu strategis Provinsi Jambi tahun 2025 antara lain :

1. Ketimpangan antar wilayah dan pendapatan
2. Daya saing daerah
3. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Isu strategis tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan melalui Prioritas RKPD Provinsi Jambi tahun 2025. Adapun yang menjadi Rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2025 ini adalah :

1. Peningkatan produktivitas daerah
2. Pembangunan sosial budaya
3. Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - Meningkatkan kolaborasi dalam pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana
 - Mendorong implementasi perhutanan social lebih diperluas
 - Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan
 - Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
5. Tata kelola pemerintah

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Sejalan dengan visi Pemerintahan Provinsi Jambi periode 2021-2026 adalah “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional (MANTAP)“, maka disusunlah misi pembangunan Provinsi Jambi yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran, yaitu :

- 1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
- 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
- 3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif.

Misi pembangunan yang selaras dengan urusan bidang Lingkungan Hidup adalah misi ke-2.

Tujuan berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi periode 2021-2026 dan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu :

- **Tujuan 1** *“Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan”*

Indikator kinerja tujuan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

- **Tujuan 2** *“Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik”*

Indikator kinerja tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 terdiri dari 2 (dua), yaitu :

- **Sasaran 1** “Meningkatnya kualitas udara, air, dan air laut serta ekosistem gambut”

Indikator Kinerja Sasaran terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU)
2. Indeks Kualitas Air (IKA)
3. Indeks Kualitas Air laut (IKAL)
4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)

Untuk data realisasi IKAL dan IKEG ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan berkoordinasi dengan instansi terkait.

- **Sasaran 2** “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik”

Indikator Kinerja Sasaran yaitu Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah atau opsi Nilai AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	70,87	71,70	72,07	72,44	72,8	73,17	73,53
Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	1. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	85,65	84,31	84,42	84,52	84,62	84,72	84,82
		2. Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	56,75	61,09	61,19	61,29	61,39	61,49	61,59
		3. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	55,93	76,54	77,19	77,84	78,49	79,14	79,79
		4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	Poin	69,14	73,39	73,89	74,39	74,89	75,39	75,89
Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	5. Predikat AKIP (opsi Nilai AKIP)	Poin	B (61,59)	B (62,5)	B (63)	B (63,5)	B (64)	B (64,5)	B (65)
		6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82,83	83	83,25	83,50	83,75	84,00	84,25

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) RPJMN 2020-2024 terdiri dari 5 komponen yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air

(IKA), Indeks Tutupan Lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Target setiap komponen terdiri atas :

- a. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara 84,1 – 84,5
- b. Meningkatnya Indeks Kualitas Air 55,1 – 55,5
- c. Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan 61,6 – 65,5
- d. Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut 58,5 – 60,5

Berdasarkan rincian komponen tersebut ditetapkan target IKLH 2020-2024 yaitu 68,71-69,74.

Sinergi antara prioritas pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, selanjutnya diuraikan pada arah kebijakan yang dipakai dalam perencanaan strategis di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola lingkungan yang meliputi Penyusunan dan Penetapan RPPLH, Penerapan RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, Peninjauan kembali RPPLH Provinsi Jambi, Pengintegrasian RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, penetapan baku mutu kelas air level Provinsi, penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PPRKD) serta penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DPKLHD).
2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan yang meliputi Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Jambi, Penyusunan KLHS Tata Ruang, Penyusunan KLHS KRP dan Peninjauan kembali RZWP3K Provinsi Jambi.
3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan, meliputi pemantauan kualitas udara ambien, air sungai, danau, air laut, ekosistem gambut, koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor LH, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan,

- identifikasi lahan bekas terbakar dan lahan gambut, dan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian LB3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R, meliputi penyusunan rencana pengelolaan sampah Regional, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional, dan penyusunan dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional.
 5. Penegakan hukum lingkungan hidup, meliputi fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH, pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur, peningkatan kapasitas PPLHD di Provinsi Jambi, dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan LH melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
 6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH, meliputi pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH; pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya LH; dan penyuluhan dan kampanye LH; Pembinaan dan penilaian ADIPURA, Kalpataru, Kampung Iklim, Adiwiyata, dan PROPER.
 7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan meliputi pelayanan pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan, pelayanan pos pengaduan lingkungan serta pendayagunaan laboratorium lingkungan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Hasil evaluasi kinerja Tahun 2023 menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup perlu menaikkan anggarannya agar upaya pengelolaan lingkungan hidup bisa lebih baik lagi. Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 sebesar Rp23.125.384.218,- (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung (1 subkegiatan rutin) sebesar Rp14.120.298.459,- dan Belanja Langsung sebesar Rp9.005.085.759,- untuk mendanai 9 Program (1 program rutin dan 8 program urusan LH), 17 kegiatan (7 kegiatan rutin dan 10 kegiatan urusan LH), 39 subkegiatan (24 subkegiatan rutin dan 15 subkegiatan urusan LH). Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp22.569.449.279,- (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh Sembilan dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 97,60% dengan sisa dana sebesar Rp555.934.939,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Target penerimaan retribusi jasa laboratorium Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.876.490.200,- dan realisasi per 31 Desember sebesar Rp2.325.415.745,- (80,84%).

Program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah

dibuat serta sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil untuk pencapaian target yang telah ditetapkan DLH Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2025
- b. Menyusun tahapan kegiatan/anggaran
- c. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan

Urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada Tahun 2024 ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi direncanakan akan melaksanakan sebanyak 11 (sebelas) program 20 (dua puluh) kegiatan 60 sub kegiatan, dengan rincian yaitu 1 (satu) program 7 (tujuh) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan merupakan non urusan, sedangkan 10 (tujuh) program 13 (tiga belas) kegiatan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan merupakan urusan bidang lingkungan hidup. Program prioritas ini dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Jambi serta tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Rencana kerja (program/kegiatan) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 seperti tercantum dalam Tabel 8 berikut ini :

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

TABEL 8

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 BESERTA PROYEKSI MAJU TAHUN 2026
PROVINSI JAMBI**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah		B (64,5)	19.371.225.097			B (65)	22.017.300.000
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun		25 laporan/ dokumen	759.600.600			25 laporan/ dokumen	812.000.000
2.11.01.1.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	4 dokumen	424.490.100	APBD		4 dokumen	450.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Jambi	3 dokumen	3.000.000	APBD		3 dokumen	3.000.000
2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi Jambi	3 dokumen	3.000.000	APBD		3 dokumen	3.000.000
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Provinsi Jambi	3 dokumen	3.000.000	APBD		3 dokumen	3.000.000
2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Provinsi Jambi	3 dokumen	3.000.000	APBD		3 dokumen	3.000.000
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Jambi	6 laporan	98.754.650	APBD		6 laporan	125.000.000
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	3 laporan	224.355.850	APBD		3 laporan	225.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah		35 laporan/dokumen	16.340.066.674			35 laporan/dokumen	17.018.000.000
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Jambi	120 orang/bulan	16.322.066.674	APBD		120 orang/bulan	17.000.000.000
2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Jambi	12 dokumen	5.000.000	APBD		12 dokumen	5.000.000
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Jambi	2 laporan	5.000.000	APBD		2 laporan	5.000.000
2.11.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Provinsi Jambi	5 dokumen	3.000.000	APBD		5 dokumen	3.000.000
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Jambi	14 laporan	5.000.000	APBD		14 laporan	5.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		150 orang	148.720.000			150 orang	154.800.000
2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi Jambi	175 paket	112.420.000	APBD		180 paket	117.000.000
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Jambi	5 orang	19.800.000	APBD		5 orang	19.800.000
2.11.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	40 orang	6.000.000	APBD		45 orang	6.750.000
2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	70 orang	10.500.000	APBD		75 orang	11.250.000
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	916.044.030			100 %	1.059.500.000
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	10 paket	24.953.530	APBD		10 paket	25.000.000
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	40 paket	199.953.000	APBD		40 paket	200.000.000
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	1000 orang	79.550.000	APBD		1000 orang	80.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Jambi	12 paket	64.997.500	APBD		12 paket	65.000.000
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Provinsi Jambi	12 dokumen	4.500.000	APBD		12 dokumen	4.500.000
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi	30 laporan	312.140.000	APBD		30 laporan	450.000.000
2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Jambi	4 laporan	30.000.000	APBD		4 laporan	35.000.000
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi Jambi	2 dokumen	199.950.000	APBD		2 dokumen	200.000.000
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		25 unit	364.320.000			25 unit	1.040.000.000
2.11.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Provinsi Jambi	1 unit	235.320.000	APBD		1 unit	400.000.000
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi Jambi	19 unit	111.000.000	APBD		19 unit	300.000.000
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	4 unit	18.000.000	APBD		4 unit	40.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	1 unit	0	APBD		1 unit	300.000.000
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		298 laporan	630.764.393			298 laporan	753.000.000
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Jambi	250 surat	3.000.000	APBD		250 surat	3.000.000
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Jambi	36 bulan	449.999.593	APBD		36 bulan	450.000.000
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	12 bulan	177.764.800	APBD		12 bulan	300.000.000
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara		126 unit	211.709.400			127 unit	1.180.000.000
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Jambi	22 unit	0	APBD		23 unit	500.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Jambi	9 unit	79.984.800	APBD		9 unit	500.000.000
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Jambi	92 unit	74.955.000	APBD		92 unit	75.000.000
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Jambi	3 unit	56.769.600	APBD		3 unit	105.000.000
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		100 %	636.931.200			100 %	2.800.000.000
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi disusun		2 dokumen	252.519.200			2 dokumen	500.000.000
2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun	Provinsi Jambi	0 dokumen	0	APBD		0 dokumen	0
2.11.02.1.01.0005	Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi Jambi yang ditetapkan	Provinsi Jambi	1 dokumen	7.519.200	APBD		0 dokumen	0

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Provinsi Jambi	0 dokumen	0	APBD		1 dokumen	250000000,0
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	Provinsi Jambi	1 dokumen	245.000.000	APBD		1 dokumen	250.000.000
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara		5 dokumen	384.412.000			5 dokumen	2.300.000.000
2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Provinsi Jambi	1 dokumen	4.856.000	APBD		1 dokumen	500.000.000
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD yang disusun	Provinsi Jambi	1 dokumen	2.600.000	APBD		1 dokumen	600.000.000
2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Provinsi Jambi	1 dokumen	245.000.000	APBD		1 dokumen	400.000.000
2.11.02.1.02.0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun	Provinsi Jambi	2 dokumen	131.956.000	APBD		2 dokumen	800.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)		IKA : 61,49 IKU : 84,72 IKAL : 79,14 IKEG : 75,39	poin	3.044.208.903			IKA : 61,59 IKU : 84,82 IKAL : 79,79 IKEG : 75,89	poin	4.575.236.000
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan		94	titik	2.524.208.903			94	titik	4.055.236.000
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Provinsi Jambi	6	dokumen	100.000.000	APBD		6	dokumen	100.000.
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Provinsi Jambi	6	dokumen	250.000.000	APBD		6	dokumen	250.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut)	Provinsi Jambi	6 lokasi	355.236.000	APBD		6 lokasi	355.236.000
2.11.03.1.01.0010	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Provinsi Jambi	2 dokumen	250.000.000	APBD		2 dokumen	250.000.000
2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Provinsi Jambi	1 dokumen	37.314.000	APBD		1 dokumen	200.000.000
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Provinsi Jambi	4680 dokumen	1.531.658.903	APBD		5040 dokumen	2.900.000.000
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan		10 lokasi	520.000.000			10 lokasi	520.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	Provinsi Jambi	12 dokumen	315.000.000	APBD		12 dokumen	315.000.000
2.11.03.1.03.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kab/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	Provinsi Jambi	4 kegiatan	205.000.000	APBD		6 kegiatan	205.000.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi		100% %	0			100% %	500.000.000
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun		1 dokumen (Perda/Peraturan)	0			1 dokumen (Perda/Peraturan)	500.000.000
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Provinsi Jambi	1 dokumen	0	APBD		1 dokumen	150.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	18,5 Ha	0	APBD		18,5 Ha	350.000.000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)		100 %	164.799.600			100% %	165.000.000
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi		5 perusahaan	164.799.600			6 perusahaan	165.000.000
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Provinsi Jambi	1 dokumen	14.800.000	APBD		1 dokumen	0

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Provinsi Jambi	22 dokumen	149.999.600	APBD		22 dokumen	165.000.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		79% (55 perusahaan)	1.269.680.200			86% (60 perusahaan)	1.490.000.000
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		70 usaha/kegiatan	1.269.680.200			70 usaha/kegiatan	1.490.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.06.1.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Provinsi Jambi	20 dokumen	325.000.000	APBD		20 dokumen	350.000.000
2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Jambi	15 orang	150.000.000	APBD		15 orang	150.000.000
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Provinsi Jambi	75 badan usaha	544.680.200	APBD		80 badan usaha	690.000.000
2.11.06.1.01.0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Provinsi Jambi	11 dokumen	250.000.000	APBD		11 dokumen	300.000.000
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi		93% 64,28% (27 MHA)	193.450.000			100% 64,28% (27 MHA)	400.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui		39	MHA	102.460.000			42	MHA	250.000.000
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi Jambi	11 doku men	11 kab/kota	102.460.000	APBD		11 doku men	11 kab/kota	250.000.000
2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang difasilitasi		39	kelembagaan	90.990.000			42	kelembagaan	150.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Provinsi Jambi	39 dokumen	90.990.000	APBD		42 dokumen	150.000.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina		80% %	500.000.000			80% %	600.000.000
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		5 kali	500.000.000			5 kali	600.000.000
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		5 dokumen	400.000.000	APBD		5 dokumen	500.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat		125 orang	100.000.000	APBD		125 orang	100.000.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi		100% %	0			100% %	850.000.000
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan		6 kategori	0			6 kategori	850.000.000
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Provinsi Jambi	6 entitas	0	APBD		6 entitas	850.000.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif		100 %	432.814.000			100 %	1.550.000.000
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan	Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan		18 kasus	432.814.000			19 kasus	1.550.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan		25 kasus				28 kasus	
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	Provinsi Jambi	18 pengaduan	227.272.000	APBD		19 pengaduan	550.000.000
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	25 perkara	67.824.000	APBD		28 perkara	400.000.000
2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	12 perkara	42.200.000	APBD		15 perkara	400.000.000
2.11.10.1.01.0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Provinsi Jambi	4 perkara	95.518.000	APBD		4 perkara	200.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi		30% %	646.480.000			30% %	400.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

		Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi		70%				70%	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pengurangan sampah secara regional		224.9 ton/82,86 tahun	646.480.000			224.9 ton/82,86 tahun	400.000.000
		Jumlah penanganan sampah secara regional		524.9 ton/60,00 tahun				524.9 ton/60,00 tahun	
2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Provinsi yang disusun dan ditetapkan	Provinsi Jambi	11 dokumen	220.360.000	APBD		11 dokumen	100.000.000
2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional	Jumlah fasilitas TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Provinsi Jambi	1 unit	99.900.000	APBD		1 unit	100.000.000
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	Provinsi Jambi	2 dokumen	55.500.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
2.11.11.1.01.0006	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	Provinsi Jambi	524.9 ton/60,00	112.160.000	APBD		524.9 ton/60,00	50.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

2.11.11.1.01.0010	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Provinsi Jambi	11 dokumen	9.990.000	APBD		11 dokumen	50.000.000
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi Jambi	11 dokumen	148.570.000	APBD		11 dokumen	50.000.000
					26.259.589.000				35.347.536.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

TAGGING KEGIATAN HIBAH JSMLP BOICF ISFL PROVINSI JAMBI

Nomor Rekening	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kegiatan Rinci Hibah JSMLP Bio CF	2025	2026
2.11.02.1.01.01	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	1.3.2.4. Pembuatan Dokumen Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	-	-
2.11.02.1.01.01	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	1.2.3.4 Melakukan studi carbon, manfaat non carbon, (penduduk asli/ Masyarakat Hukum Adat)	-	-
2.11.07.1.01.01	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan MHA yang terkait dengan PPLH	Kordinasi, Sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak kerarifan lokal atau pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait RPPLH	1.3.2.2. Pengakuan MHA di Jambi	-	-
2.11.07.1.02.01	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait RPPLH	Pemberdayaan Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	2.2.1.1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas lembaga MHA kearifan lokal atau kearifan lokal dan sumberdaya tradisional	210.000.000	-
2.11.07.1.02.01	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait RPPLH	Pemberdayaan Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1.2.3.1. Peningkatan kapasitas Untuk menerapkan safeguard (pengaman kegiatan)	-	-
2.11.01.1.01.05	Program Penunjang Urusan pemertinah daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.2.1.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan	436.000.000	-
				Total Cost (Rp)	646.000.000	-

Rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Tabel 8 di atas tentu merupakan rencana yang dapat mengalami perubahan pada realisasinya tergantung dari beberapa faktor, misalnya menyesuaikan dengan kemampuan anggaran pembiayaan daerah, terbitnya peraturan perundangan yang mengganti peraturan yang berlaku saat ini, perubahan struktur organisasi dan lain sebagainya. Sehubungan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, harus memiliki indikator yang dapat diukur sehingga alur pertanggungjawaban keberhasilan program tersebut menjadi jelas. Pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini telah mencantumkan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi hasil pemetaan yang telah diverifikasi sebelumnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pemetaan program kegiatan (Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023).

Program kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, baik melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta untuk meningkatkan tutupan vegetasi/tutupan lahan. Dari keseluruhan program kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, terdapat 3 program/kegiatan/sub kegiatan yang dikategorikan responsif gender, yaitu :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan mengadakan pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung.

2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan mengadakan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup kepada masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat baik perempuan ataupun laki-laki, dengan membentuk kelompok masyarakat berbasis masyarakat yang secara mandiri melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah di TPA/TPST Regional adalah mendorong terciptanya paradigma baru masyarakat (laki-laki maupun perempuan) dalam pengelolaan persampahan yang memandang sampah sebagai sumber daya yang bernilai dan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program Dinas Lingkungan Hidup merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Lingkungan Hidup ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2025 didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD dan Bank Dunia (Bio CF). Hasil perhitungan kebutuhan anggaran akan ditetapkan sesuai hasil pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, maka tersusunlah rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

TABEL 9
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN TAHUN 2025

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B (64,5)	19.371.225.097
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	25 laporan/ dokumen	759.600.600
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	424.490.100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	3.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	3.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	3.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dokumen	3.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan laporan	98.754.650
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	224.355.850
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	35 laporan/ dokumen	16.340.066.674

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 orang/bulan	16.322.066.674
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	5.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	5.000.000
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen	3.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 laporan	5.000.000
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	150 orang	148.720.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	175 paket	112.420.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	19.800.000
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	40 orang	6.000.000
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	70 orang	10.500.000
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	916.044.030
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	24.953.530
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 paket	199.953.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 orang	79.550.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	64.997.500
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.500.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	312.140.000
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 laporan	30.000.000
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	199.950.000
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	25 unit	364.320.000
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	235.320.000
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 unit	111.000.000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	18.000.000
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	298 laporan	630.764.393
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 surat	3.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 bulan	449.999.593
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	177.764.800
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	126 unit	211.709.400

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 unit	0
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	79.984.800
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	74.955.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	56.769.600
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100%	636.931.200
II.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi disusun	2 dokumen	252.519.200
1	Penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun	0 dokumen	0
2	Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi Jambi yang ditetapkan	1 dokumen	7.519.200
3	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	0 dokumen	0
4	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	1 dokumen	245.000.000
II.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	5 dokumen	384.412.000
1	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 dokumen	4.856.000
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	1 dokumen	2.600.000
3	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	1 dokumen	245.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

4	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun	2 dokumen	131.956.000
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	IKA : 61,49 poin	3.044.208.903
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU : 84,72	
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	IKAL : 79,14	
		Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	IKEG : 75,39	
III.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	94 titik	2.524.208.903
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6 dokumen	100.000.000
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 dokumen	250.000.000
3	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut)	6 lokasi	355.236.000
4	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2 dokumen	250.000.000
5	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 dokumen	37.314.000
6	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	4680 dokumen	1.531.658.903
III.2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	10 lokasi	520.000.000

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	12 dokumen	315.000.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kab/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	4 kegiatan	205.000.000
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi	100%	0
IV.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun	1 Dokumen (Perda/ Pergub)	0
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	0
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	18,5 Ha	0
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	100%	164.799.600
V.1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	5 perusahaan	164.799.600
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	14.800.000

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	22 dokumen	149.999.600
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	79% (55 perusahaan)	1.269.680.200
VI.1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	70 usaha/kegiatan	1.269.680.200
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen	325.000.000
2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	15 orang	150.000.000
3	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75 badan usaha	544.680.200
4	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	11 dokumen	250.000.000
VII	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi		193.450.000

VII.1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	39 MHA	102.460.000
1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11 dokumen	102.460.000
VII.2	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	39 kelembagaan	90.990.000
1	Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	39 dokumen	90.990.000
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina	80%	500.000.000
VIII.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	5 kali	500.000.000
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 dokumen	400.000.000
2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	125 orang	100.000.000
IX	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	100%	0

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

IX.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan	6 kategori	0
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6 entitas	0
X	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	100%	432.814.000
X.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan	18 kasus	432.814.000
		Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan	25 kasus	
1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	18 pengaduan	227.272.000
2	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	25 perkara	67.824.000
3	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	12 perkara	42.200.000
4	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	4 perkara	95.518.000
XI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbunan sampah di Provinsi Jambi	30%	646.480.000
		Persentase penanganan timbunan sampah di Provinsi Jambi	70%	
XI.1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pengurangan sampah secara regional	224.982,86 ton/tahun	646.480.000
		Jumlah penanganan sampah secara regional	524.960,00 ton/tahun	

RENCANA KERJA DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Provinsi yang disusun dan ditetapkan	11 dokumen	220.360.000
2	Pengoperasian dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional	Jumlah fasilitas TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	1 unit	99.900.000
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	2 dokumen	55.500.000
4	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	524.960,00 ton	112.160.000
5	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	11 dokumen	9.990.000
6	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	11 dokumen	148.570.000
TOTAL				26.259.589.000

Kegiatan BIOCF

Nomor Rekening	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Kegiatan Rinci Hibah JSLMP Bio CF	Pagu (Rp)
2.11.07.1.02.01	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengatahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait RPPLH	Pemberdayaan Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	2.2.1.1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas lembaga MHA kearifan lokal atau kearifan lokal dan sumberdaya tradisional	210.000.000
2.11.01.1.01.05	Program Penunjang Urusan pemertinah daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.2.1.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan	436.000.000
TOTAL					646.000.000

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025. Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 mempedomani Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan lingkungan hidup yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Lingkungan Hidup.

Semoga Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : Juni 2024

KEPALA DINAS,

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660105 200012 1 002